



# RENCANA STRATEGIS LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO



Periode  
2020-2024

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya hingga Renstra Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo periode 2020-2024 dapat selesai tepat pada waktunya. Meskipun renstra merupakan hal baru untuk UPT tapi, berkat kerjasama yang baik antara instansi pusat dan daerah serta setiap elemen yang ada dalam organisasi di UPT sehingga dalam penyusunan renstra tidak menghadapi hambatan yang berarti.

Kami menyadari renstra ini masih jauh dari kata sempurna, olehnya dukungan baik berupa kritik maupun saran sangat diperlukan untuk memperbaiki renstra ini kedepannya. Disamping hal tersebut Renstra Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo merupakan sasaran pembangunan Hukum jangka menengah (RPJM) 2015-2019 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Salah satu sasaran strategisnya berupa kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan agar semakin berkembang, semakin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah sekaligus mensukseskan arah kebijakan Presiden dalam pidatonya.

Sebagai warga Negara yang baik dalam menciptakan organisasi yang tepat guna sudah menjadi kewajiban untuk loyal terhadap pimpinan sesuai dengan visi Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Tak lupa diakhir kalimat kata pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah berpartisipasi, dalam penyusunan renstra ini.



N. FIRIYATI, Bc.IP.,SH.,M.Si  
No. 0404189859032002

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki tujuan yang tidak berdiri sendiri, tujuan yang dimaksud merupakan satu batang tubuh dengan kebijakan Presiden dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, agar tercapainya tujuan diperlukann rencana strategi yang berisi kebijakan, program, langkah-langkah kegiatan yang disusun sesuai pedoman RPJM Nasional 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat bekerjasama mewujudkan tujuan bersama yang tertuang dalam Rencana Strategi. Olehnya, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, menjadi suatu keharusan untuk dapat menyusun Rencana Strategi yang selanjutnya disebut dengan Renstra, mengapa? Selain alasan di atas, sebagai UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo Lapas Perempuan memiliki sasaran kinerja dan anggaran masing-masing untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengoperasian Lapas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Dalam penyusunan Renstra sebuah lembaga atau instansi memerlukan Sumber Daya Manusia yang terstruktur untuk penerapannya, berikut struktur organisasi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo:



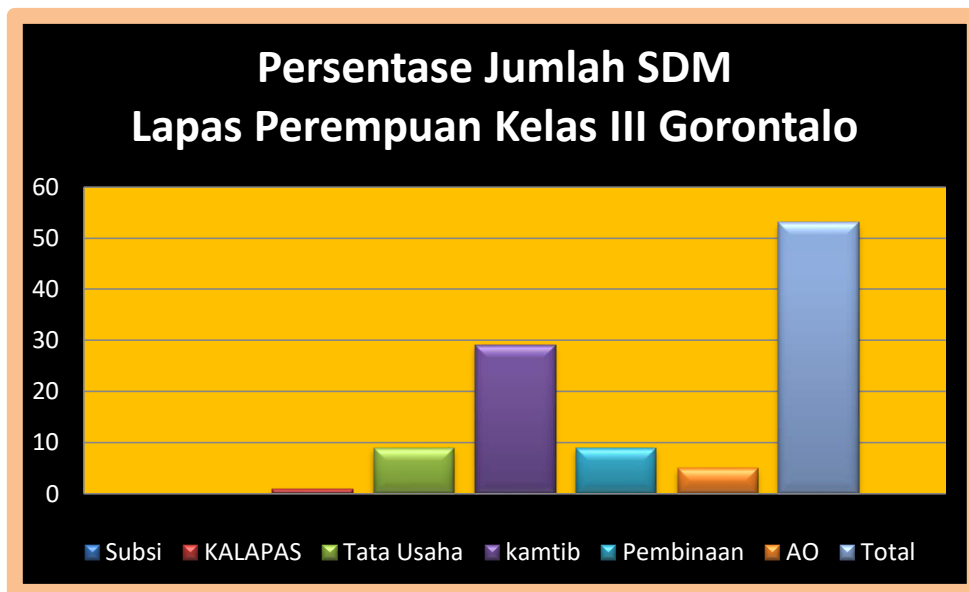
**Gambar 1.1.A Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo**

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas masing-masing orang memegang tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi. SDM yang ada di Lapas Perempuan Berjumlah 53 orang terdiri dari :

- 1 Orang Kalapas Perempuan Kelas III Gorontalo membawahi:
- 1 Kaur Tata Usaha membawahi
  - 1 Orang Bendahara
  - 2 Orang Pengelola Keuangan
  - 5 Orang Staf Umum dan Kepegawaian
- 1 Orang Kasubsi Kamtib membawahi:
  - 4 Orang staf Kamtib
  - 4 Orang Kepala Regu Pengamanan
  - 20 Orang Anggota Jaga
- 1 Orang Kasubsi Pembinaan membawahi:

- 2 Orang Staf Poliklinik
- 2 Orang Staf Bama
- 4 Orang Staf Pembinaan
- 1 Orang Kasubsi Admisi dan Orientasi membawahi:
  - 4 Orang Staf Admisi dan Orientasi

Keseluruhan SDM memiliki latar belakang Pendidikan Formal dan Keterampilan yang berbeda, setiap subsi memegang peranan penting dalam menjalankan Program yang dibuat dalam Renstra, berikut persentase jumlah SDM persubsidi:



**Gambar 1.1.B Grafik SDM Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo**

Selain SDM setiap Instansi maupun Lembaga membutuhkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan, hal ini berlaku pula untuk Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo berikut Saprass dan Fungsinya:

1. Gedung Utama (Gedung Kantor)
  - Terdiri dari 5 Ruang Utama
  - Ruang Kalapas
  - Ruang Kasubsi Kamtib

- Ruang Staf masih menyatu dengan Ruang Kasubsi Kamtib

#### Ruang Kaur Tata Usaha

- Ruang Bendahara
- Ruang Pengelola Keuangan
- Ruang Kepegawaian dan Umum masih menyatu dengan Ruang Kaur Tata Usaha

#### Ruang Pembinaan

- Ruang Poliklinik
- Ruang Staf masih menyatu dengan Ruang Pembinaan

#### Ruang Admisi dan Orientasi

- Ruang Pengelola SDP
- Ruang Staf Admisi dan Orientasi

#### Ruang Portir

Lalu lintas kegiatan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

#### Ruang Layanan Titipan

Tempat keluar masuknya titipan barang/makanan bagi warga binaan

#### Ruang Keterampilan

Pelaksanaan giat pembinaan kemandirian

#### Ruang Kunjungan

Disediakan untuk besukan narapidana/tahanan, namun untuk sementara ditiadakan karena Covid19

#### Ruang Laktasi

Disediakan untuk keluarga narapidana/tahanan yang busui

## 2. Gedung II (Dapur)

Ruang instalasi air

Ruang Masak

Kamar tidur untuk narapidana asimilasi dapur

Kamar untuk petugas bama

Ruang Sholat



- Ruang Bahan Makanan
- 3. Gedung III (Blok Hunian)
  - Kamar Tidur
  - Terbagi atas kamar tahanan, narkoba, tipikor, pidum, laktasi, asimilasi, karantina, mapenaling, isolasi
  - Pos Jaga
  - Laundry
- 4. Mesjid
- 5. Puspembika (Pusat Pelatihan Pembinaan Kemandirian) Narapidana/Tahanan
  - Bangunan semi permanen yang dibuat untuk tindak lanjut giat kemandirian warga binaan seperti *Salon, Pantry, dan Rumah Kue*

### Capaian Kinerja Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo 2015-2019

Tabel 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Capaian Kinerja					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan Gorontalo	-	-	-	-	90/90	2015 s/d 2016 LPP belum terbentuk 2017 s/d 2018 LPP masih menyatu dengan LP Kota

pada tabel di atas terlihat jelas kenaikan capaian kinerja untuk sasaran kegiatan **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan Gorontalo”** pada tahun 2015 s/d 2017 belum terlaksana karena Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo belum beroperasi.

Setelah tahun 2018 barulah dimulai dengan pemenuhan target kinerja berdasarkan sasaran kegiatan. Namun, masih jauh dari kata memuaskan karena pada tahun 2018 Lapas Perempuan masih berada satu atap dengan Lapas Kelas IIA Gorontalo, ruang besukan yang masih seadanya, sapsas yang masih sangat minim dan pengelolaan yang belum terstruktur baik. Barulah pada tahun 2019 Lapas Perempuan mulai mengelola manajemen dan sapsas penunjang mulai dari tersedianya gedung mandiri yang bertempat di kabupaten gorontalo kecamatan limboto, penyediaan sapsas pendukung seperti ruangan khusus penitihan barang, pemeriksaan/penggeledahan, ruang besukan, kantin untuk menunjang kebutuhan dan pelayanan besukan narapidana dan tahanan. Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder, menyusun strategi pengelolaan manajemen dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

**Tabel 1.1.2 Meningkatkan Produktifitas Narapidana menuju Manusia Mandiri dan Berdaya Guna**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Capaian Kinerja					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Narapidana yang berhasil di Gorontalo	-	-	-	-	30/30 100	2015 s/d 2016 LPP belum terbentuk 2017 s/d 2018 LPP masih menyatu dengan LP Kota

Capaian kinerja pada sasaran kinerja **“Meningkatkan Produktifitas Narapidana menuju Manusia Mandiri dan Berdaya Guna dengan Indikator Kinerja Persentase Narapidana yang berhasil di Gorontalo”** tidak berbeda dengan penjelasan sebelumnya, pada capaian kinerja sasaran kegiatan 1.1.2 narapidana yang berhasil di Gorontalo sesuai dengan



interview yang dilakukan oleh petugas secara non formal pada mantan narapidana yang berkunjung sebagai pembesuk selama tahun 2019, masing-masing telah mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, diantaranya sebagai pegawai swasta, memiliki usaha UMKM ada juga yang kembali pada pekerjaan lamanya sebagai PNS. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat jelas bahwa target yang ingin di capai pada sasaran kegiatan 1.1.2 telah terpenuhi

**Tabel 1.1.3 Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Capaian Kinerja					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Menurunnya Persentase Residivis Gorontalo	-	-	-	-	10/10	2015 s/d 2016 LPP belum terbentuk 2017 s/d 2018 LPP masih menyatu dengan LP Kota

Capaian kinerja pada sasaran kinerja “**Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat dengan Indikator Kinerja Menurunnya Persentase Residivis Gorontalo**” pada tahun 2019 terhitung dari jumlah Narapidana keseluruhan hanya terdapat ± 1% sesuai dengan data SDP yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa target untuk 1.1.3 telah terpenuhi.

**Tabel 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana Pelayanan Tahanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pengelolaan Basan Baran**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Capaian Kinerja					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian sesuai dengan Standar Gorontalo	-	-	-	-	10/10	2015 s/d 2016 LPP belum terbentuk 2017 s/d 2018 LPP masih menyatu dengan LP Kota
						100	
2	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan sesuai dengan Standar Gorontalo	-	-	-	-	90/90	
						100	
3	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Masyarakat sesuai dengan Standar Gorontalo	-	-	-	-	90/90	
						100	

Capaian kinerja pada sasaran kinerja “**Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana Pelayanan Tahanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pengelolaan Basan Baran dengan tiga Indikator kinerja**” sesuai dengan laporan bulanan subsidi Pembinaan, Kamtib, Admisi dan Orientasi, Tata Usaha selama tahun 2019 keseluruhan perawatan, pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo memiliki Potensi-potensi untuk mencapai visi misi Presiden, yaitu:

1. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan stakeholder yang memudahkan dalam menjalankan program pembinaan dan pembangunan
2. Terdapat lahan tidur yang dapat dikelola menjadi lahan produksi.
3. Adanya SDM dalam hal ini warga binaan yang memadai untuk pengelolaan sapsas dengan biaya jasa yang cukup hemat

Selain potensi-potensi tersebut, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo belum optimal
2. Masalah Air PDAM yang sering macet yang diakibatkan masalah Teknis
3. Belum adanya IPAL dan Drainase
4. Belum adanya rumah dinas Kalapas
5. Belum adanya Aula Kantor
6. Sarana prasarana penunjang Keamanan dan Ketertiban belum ada, seperti X-ray, Metal Detector, dan senjata api
7. Belum adanya Pos Atas
8. Terlambatnya Surat Perpanjangan Penahanan yang diterima oleh pihak Lapas
9. Eksekusi Putusan Yang Lambat Oleh JPU
10. Sarana Dan Pra Sarana Kegiatan Pembinaan dan Kesehatan belum Memadai

11. Beberapa Permintaan Justice Colablator (JC) Yang Dibutuhkan Oleh Warga Binaan Yang Putusannya Di Atas 5 tahun Untuk Proses Integrasi Tidak/Belum Dikeluarkan Oleh Pihak Yang Menahan.
12. Kurangnya Perangkat komputer Penunjang Laporan
13. Belum menguasai SDP Fitur Bama
14. SDM belum memiliki sertifikat Tata Boga dan Sertifikat Hygiene Sanitasi Makanan ( Juru Masak)
15. Dapur Lapas Perempuan Gorontalo belum memiliki Sertifikat Laik Hygiene

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi dan Misi

Pada pidato presiden mengutamakan lima indikator penting dalam menjalankan roda pemerintahan yakni Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi, dalam 5 indikator utama presiden juga menjabarkan Visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan menuangkan 9 (Sembilan) point utama Misi Presiden sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sejalan dengan pidato presiden di atas dirumuskanlah Visi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berbunyi **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”** dan menjalankan Misi Kementerian Hukum dan HAM periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

## **2.2 Tujuan dan Saran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI 2020-2024**

### **Tujuan :**

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Primas
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat
4. Terlindunginya hak asasi manusia
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI asing

7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang Kompeten dan terlaksananya Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*. Terbagi menjadi :

1. Sasaran strategis “Prespektif Pemangku Kepentingan Eksternal”:
  - a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
  - b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
2. Sasaran Strategis “Prespektif Bisnis Proses Internal”
  - a. Memastikan pelayanan di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - b. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
3. Sasaran Strategis “Prespektif Bisnis Proses Internal”
  - a. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
4. Sasaran Strategis “Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan”
  - a. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM



- b. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

### 2.3 TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**,  
adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan. Mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**,  
adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa

menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

### Program Dukungan dan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

### Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum

### Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah
Meningkatnya Produktivitas	Persentase Mantan Narapidana /

<b>Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat Menuju Manusia Mandiri di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	Anak Yang Berhasil di wilayah
<b>Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat di lingkungan UPT PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	Menurunnya Persentase Residivis di wilayah
<b>Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak</b>	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
<b>Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas</li> </ol>
<b>Meningkatnya Layanan Bimbingan Masyarakat Bagi Klien Masyarakat pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Masyarakat dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah layanan masyarakat yang berbasis TI pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>
<b>Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Masyarakat khususnya dalam pelaksanaan</b>	Jumlah pelaksanaan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Masyarakat

<b>program di bidang teknologi informasi dan kerja sama</b>	
<b>Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan</b>	Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>Meningkatnya pengelolaan basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>Meningkatnya Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana pada Rupbasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</b>	Persentase basan baran yang teregistrasi dengan baik sesuai standar

#### Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Gorontalo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Gorontalo</li> <li>2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Gorontalo</li> <li>3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Gorontalo</li> </ol>

#### Program Pembinaan Hukum Nasional

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
<b>Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah</b>	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin

	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

### Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM</b>	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
	Persentase insitusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM
	Persentase Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	Persentase Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM
	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM berat masa lalu secara non Yudisial
	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti

### Program Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Terselenggaranya Pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM</b>	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran

kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah

### Program Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

### Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

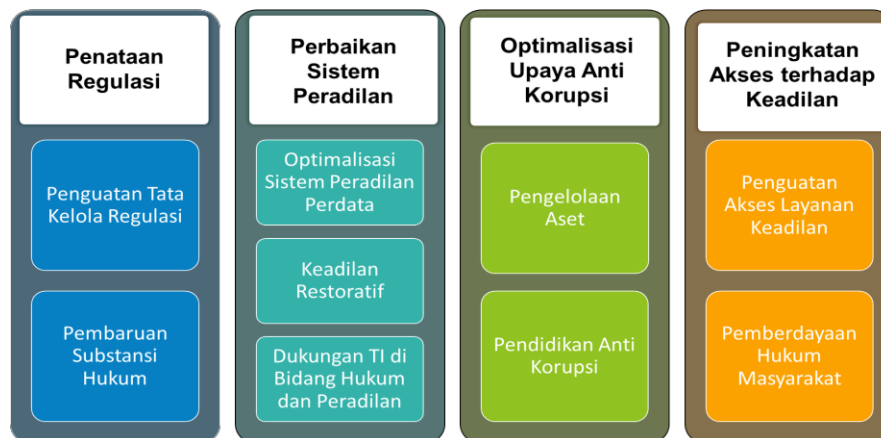
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia



### BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Berdasarkan hal tersebut maka, dirumuskan Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024: *“mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara, mewujudkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien”*.

Sejalan dengan Arah dan Sasaran Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI 2020-2024 di atas, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo merumuskan Arah dan Sasaran Strategi 2020-2024 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi

**Arah Kebijakan dan Strategi yang sesuai dengan Pelaksanaan di UPT**

**AK 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik dibidang hukum yang berkualitas**

**SS3** : Memastikan Pelayanan Publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksana di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak warga binaan berupa pemberian integrasi (Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas) dan informasi yang jelas terkait program dan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan, dan memberikan pelayanan penitipan barang/makanan dan besukan. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhan atau pernyataan tidak puas terhadap pelayanan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak Lapas demi mewujudkan pelayanan yang lebih optimal

**AK 3 : Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara**

**SS4** : Memastikan Penegakan Hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

**SS5** : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

Peran serta mewujudkan AK3, SS4, dan SS5 Lapas Perempuan bergerak sejalan dengan memprogramkan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian warga binaan serta pelatihan dan tindak lanjut berupa pengelolaan bidang giat kerja seperti salon, rumah kue, pentry, pertanian hidroponik, kerajinan tangan berupa menjahit dan merangkai bunga dari bahan dasar sabun mandi batangan, semua ini dilakukan untuk

menjadikan warga binaan nantinya setelah kembali di tengah masyarakat mampu bersaing di era globalisasi, selain itu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas juga sangat penting dalam penerapan program kegiatan agar berjalan aman dan kondusif.

**AK5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien**

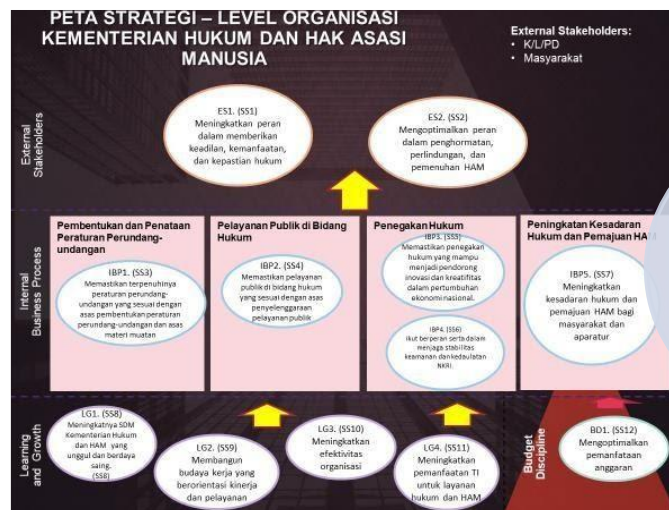
**SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien**

Pada AK5 sudah sangat jelas, saat ini seluruh UPT pemasyarakatan di bawah naungan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo berada di Zona Integritas melaksanakan program WBK/WBBM, Program WBK/WBBM mengharuskan seluruh UPT maupun Kanwil untuk dapat berperan aktif dalam pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif efisien berpedoman pada **PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)**. Untuk lebih jelas terlihat keterkaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi yang ada di UPT berikut dapat dilihat dalam susunan tabel

**Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi sesuai dengan pelaksanaan di UPT**

No	Arah Kebijakan	Sasaran Strategi	Kesesuaian dengan UPT
1.	<b>Mewujudkan Pelayanan Publik dibidang hukum yang berkualitas</b>	Mewujudkan Pelayanan Publik dibidang hukum yang berkualitas	Integrasi (PB, CB, CMB, CMK, Remisi)

2.	<b>Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara</b>	<b>Memastikan Penegakan Hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekomnomi nasional</b>	<b>Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian</b>
		<b>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</b>	<b>Pengawasan dan Pengawasan, Perawatan narapidana</b>
3.	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien</b>	<b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>	<b>Zona Integritas dan WBK/WBBM</b>



Gambar 3.1. Peta Strategi Level Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

### **3.2 Strategi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo**

Untuk dapat mencapai tujuan kinerja Lapas Perempuan banyak mencanangkan program yang akan dilaksanakan kedepannya. Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui sosialisasi, bimtek dan diklat yang terarah sistematis dan tepat sasaran
2. Mengoptimalkan pelayanan integrasi warga binaan dan pengaduan
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kemudahan dan kemajuan program Lapas
4. Mengadakan sapras pendukung keamanan dan ketertiban di Lapas seperti X-ray, Metal Detector, Senjata Api untuk pertahanan
5. Membangun fasilitas tambahan berupa blok khusus narapidana yang menderita penyakit menular, rehabilitasi narkoba
6. Mengadakan obat-obatan khusus untuk penderita penyakit menular seperti TBC dan HIV-AIDS
7. Membangun fasilitas pengobatan (klinik) yang terpisah dari bangunan umum, bangunan Aula untuk kegiatan keterampilan khusus warga binaan masyarakat, dan tempat ibadah untuk Non Muslim
8. Mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja UPT tepat waktu dan tepat sasaran

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			2020
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan masyarakatan	90%
		Menurunnya Residivis	1%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakatan di Wilayah sesuai Standar	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90%
		Persentase data masyarakatan di SDP sesuai standar	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	90%
		Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan	90%
		Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan khusus	90%
		Persentase tahanan dan narapidana narkoba yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah sesuai standar	Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dengan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi	90%
5	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%

		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti dan ditanggulangi sesuai standar	90%
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, dan penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh	13%	15%	17%	20%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	65%	70%	75%
		Persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	65%	70%	75%
3	Meningkatnya Pelayanan	Persentase pemenuhan	71%	73%	75%	77%



Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan	layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar				
	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventive) secara berkualitas				
	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%
	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan internal	95%	96%	97%	98%
	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	65%	70%	75%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit	60%	65%	70%	75%

		menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)				
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ko rban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	30%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100	100	100	100
		Nilai SMART	100	100	100	100

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan	Anggaran
		2020
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	854.475.000

No	Kegiatan	Anggaran			
		2021	2022	2023	2024
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	854.475.000	870.485.000	924.475.000	950.485.000
2	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemendan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	3.407.336.000	3.475.250.000	3.507.336.000	3.575.250.000

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Untuk mewujudkan visi dan misi presiden perlu adanya keselarasan tujuan program dengan rencana strategi yang ada di wilayah masing-masing, setiap sasaran kegiatan yang ada di masing-masing wilayah harus berdasarkan 5 pilar yaitu : Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi sampai dengan Transformasi Ekonomi. Perencanaan yang matang dan tepat sasaran akan meningkatkan potensi setiap UPT maupun kanwil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **5.2 Saran**

Renstra ini masih jauh dari sempurna kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan tindak lanjut yang lebih baik. Penyusunan renstra diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo kedepannya untuk menyusun RKAKL dan target kinerja pada periode tahun berjalan.